

BAB II

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KOTABARU YOGYAKARTA SEBAGAI KAWASAN HUNIAN ELITE BELANDA

A. Dari Segi Letak Geografis

Kotamadya Yogyakarta terletak di tengah-tengah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta berada di daerah dataran lereng gunung Merapi dengan kemiringan yang relatif datar (antara 0-3 %). Letak ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 114 meter. Luas wilayah kotamadya Yogyakarta sekitar 32,50 km²/1,02% luas wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan astronomi letak kota Yogyakarta antara 110°28' Bujur Timur dan 07°15' Lintang Selatan.¹

Berdasarkan topografinya, daerah Yogyakarta terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona timur, zona tengah, dan zona barat.² Zona timur berupa pegunungan kapur selatan dimana air sangat sulit diperoleh. Zona timur meliputi Kabupaten Gunung Kidul, sebagian daerah Sleman sebelah timur. Zona tengah merupakan daerah pertanian sawah yang subur. Kesuburan itu disebabkan oleh abu vulkanis dari Gunung Merapi. Daerah zona tengah dikelilingi oleh pegunungan sehingga tanahnya berupa tanah ledok atau kom

¹Gatut Murniatmo, dkk, 1999, *Aktualisasi nilai budaya bangsa di kalangan generasi muda daerah istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1999/2000, hlm.7.

²Suratmin, dkk, 1990, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, hlm.4.

yang sangat baik untuk penyimpanan dan penampungan air bersih. Zona tengah meliputi Kabupaten Sleman, Kotamadya Yogyakarta, dan sebagian daerah Bantul. Zona barat merupakan pegunungan kapur, yaitu patahan dari Pegunungan Menoreh. Air berada di bawah tanah, sehingga penduduknya sulit memperoleh air. Zona ini meliputi sebagian daerah Bantul dan Kulom Progo.

Menurut unit makronya, morfologi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dibagi atas Daerah unit Gunung Merapi (Kabupaten Sleman), dataran endapan (Kotamadya Yogyakarta dan sebagian Bantul), daerah plateau selatan (selatan Prambanan sampai ke pantai selatan sebelah timur Parangtritis), daerah pegunungan kompleks Kulon Progo dan pegunungan kapur Sentolo, dan daerah alluvial pantai selatan.³ Kotamadya Yogyakarta termasuk ke dalam daerah dataran endapan (*alluvial plain*). Pada garis besarnya mempunyai tipe tanah regosol/tanah vulkanis muda.

Kotamadya Yogyakarta berdasarkan letak astronomisnya merupakan daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan 2012 mm per tahun dengan 119 hari hujan. Suhu rata-rata 27,2° C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, sedangkan pada musim kemarau kering bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^{\circ}$ -140° dengan rata-rata kecepatan angin 5-16 knot/jam.⁴ Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah

³*Ibid.*, hlm.4-5.

⁴Tim Penyusun, *Profil Kotamadya Yogyakarta*. Yogyakarta: Bagian Hubungan Masyarakat, hlm.6.

kantong air yang baik. Wilayah kota Yogyakarta mengalir tiga buah sungai dari arah utara ke selatan, yaitu Sungai Winongo yang terletak di bagian barat kota, Sungai Code terletak di bagian tengah dan Sungai Gadjah Wong terletak di bagian timur.⁵

Kotabaru termasuk salah satu kelurahan yang ada di Kotamadya Yogyakarta. Ketika masa pendudukan kolonial Belanda, Kotabaru termasuk di dalam wilayah kota Yogyakarta.⁶ Pada saat ini Kotabaru termasuk dalam kecamatan Gondokusuman. Luas kawasan Kotabaru adalah 39,00 ha. Kawasan Kotabaru sebelah utara dibatasi oleh wilayah Gondokusuman, sebelah timur dibatasi kompleks perbengkelan dan kompleks perumahan pegawai perusahaan kereta api *Nederlands Indisch Spoor Maatschappij* (NISM), sebelah barat dibatasi sungai Code, dan sebelah selatan dibatasi stasiun Lempuyangan.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Kotabaru berada di dataran lereng gunung Merapi dengan kemiringan yang relatif datar (antara 0-3 %). Letak ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 114 meter.

Kotabaru berada di zona tengah dan di daerah dataran endapan (*alluvial*

⁵Djoko Suryo, Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990, dalam *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2005, hlm.31-32.

⁶Batas kota Yogyakarta pada masa kolonial Belanda tercantum dalam *Rijksblad van Kasultanan Yogyakarta* tahun 1924 no 4.

⁷Bruggen, M.P. Van, dan R.S. Wassing, *Djokja Solo Beeld van de Vorstensteden*. Nederland: Asia Maior, 1998, hlm. 44 dalam Dwi Ratna Nurhajarini, dkk, *Yogyakarta: Dari Hutan Beringan ke Ibukota Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012, hlm.56.

plain). Keberadaan Kotabaru yang berada di daerah subur, tidak terlalu dekat dengan Gunung Merapi tetapi tetap berada di daerah yang tinggi dari permukaan air laut, dan air bersih melimpah. Kotabaru di batasi oleh keberadaan Sungai Code di sebelah barat. Faktor geografis inilah yang menyebabkan Belanda memilih Kotabaru sebagai permukiman bagi golongan Eropa, khususnya orang Belanda.

B. Dari Segi Ekonomi

Politik pemerintahan Belanda di Indonesia mengalami perubahan, hal itu sejalan dengan semakin berkembangnya zaman. Imperialisme secara ekonomis mendorong perluasan dominasi Belanda atas Hindia Belanda dan pemerintah Belanda memberlakukan politik pintu terbuka atau istilah Belandanya "*opendeur politiek*". Kaum liberal sangat mendukung kebijakan pemerintah tentang politik pintu terbuka. Politik ini ditunjang oleh kalangan pengusaha swasta yang melihat Hindia Belanda sebagai pasar yang harus dibuat potensial.⁸ Sejak itu Indonesia termasuk Yogyakarta tidak lagi merupakan monopoli tempat penanaman modal swasta Belanda, melainkan menjadi wilayah internasional untuk penanaman modal. Politik Pintu Terbuka dipilih sebagai jalan untuk memperlancar pemasaran barang-barang hasil industri dan sebagai areal untuk mendapatkan bahan mentah.

Pemerintah Belanda memberi kesempatan orang-orang asing untuk menyewa tanah di Indonesia untuk angka waktu yang panjang. Kesempatan

⁸Onghokham, "*Elite dan Monopoli dalam Perspektif Sejarah*", jurnal Prisma no. 2, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm.11.

tersebut menjadi peluang bagi industri-industri Belanda yang melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial sehingga standar hidupnya perlu ditingkatkan. Modal Belanda dan modal internasional mencari peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan-bahan mentah sehingga kebutuhan tenaga kerja juga semakin bertambah.⁹ Kesempatan tersebut terbuka lebar bagi para kapitalis dari berbagai negara seperti Jerman, Perancis, Belgia, Italia, Inggris, Amerika, Jepang, dan lain-lain.¹⁰ Bagi kaum kapitalis, mendirikan industri di daerah jajahan berarti mengurangi pasaran hasil industri di negara induk yaitu Negara Belanda. Daerah jajahan harus dipertahankan sebagai pasaran hasil industri dan penghasil bahan untuk kepentingan industri di negeri induk.

Daerah jajahan dijadikan tempat menanamkan modal dan keuntungannya diangkut ke negara induk. Tanah dan tenaga-tenaga manusia harus dimanfaatkan demi kepentingan modal. Penanaman modal asing tidak hanya dalam industri-industri yang sudah ada, melainkan juga dalam usaha produksi baru karena dunia Barat mengubah bentuk usaha kefabrikan, komunikasi dan khususnya transportasi.¹¹ Perkembangan pesat di bidang sarana angkutan antara Belanda dan Nusantara karena kapal uap mulai digunakan dan terutama karena Terusan Suez telah digali. Faktor penting

⁹A. Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm.64.

¹⁰Tim Penyusun, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976/1977, hlm.191.

¹¹William Joseph O'Malley, "*Indonesia di Masa Malaise: Suatu Studi terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta di Tahun 1930-an*", Prisma No 8 Agustus 1983 tahun XII, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 31

lainnya adalah waktu pelayaran dapat dipersingkat, yang tadinya memerlukan waktu tiga bulan menjadi sekitar sebulan.¹²

Perubahan politik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda tersebut membuat kota-kota besar di Indonesia berkembang menjadi pemasok kebutuhan komoditas Eropa. Orang Eropa berbondong-bondong datang dan diiming-imingi untuk menanamkan modal di tanah jajahan melalui berbagai insentif. Salah satu yang menarik mereka menanamkan modalnya adalah adanya tenaga kerja dan tanah luas yang murah untuk dijadikan perkebunan. Penduduk Belanda melihat dan merasakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah Hindia Belanda terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan masyarakat dan ekonomi, seperti yang dikenang oleh wartawan Belanda:

“Kaum Modal Belanda melihat kemungkinan-kemungkinan baru bagi penanaman modalnya di berbagai perusahaan yang tumbuh dengan cepat. Kewajiban pemerintah bagi mereka ialah agar menyiapkan prasarana bagi perkembangan modal mereka. Namun, terdapat pegawai-pegawai negeri yang tidak terdidik sehingga tidak mampu menghadapi perimbangan-perimbangan baru. Efisiensi dinas-dinas pemerintah jauh ketinggalan dari perusahaan-perusahaan swasta. Dinas pos bekerja sangat lambat dan tidak cermat. Dinas kereta api belum berpengalaman mengatur kiriman pos, penumpang dan barang sehingga perjalanan kereta api mengalami keterlambatan. Kendaraan bermotor belum banyak digunakan.¹³

¹²Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian I (Batas-Batas Pembaratan)*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2008, hlm.79.

¹³D.M.G. Koch. *Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesie's* Gravenhage-Bandung. W. van Hoeve 1956:38. Terjemahan dari bahasa Belanda oleh penulis dalam Abdurrachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, hlm.82.

Peraturan mengenai tanah yang dijadikan perkebunan telah diatur dalam *Agrarische Wet*¹⁴. Undang-Undang Agraria berpengaruh pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921) sehingga banyak bermunculan pabrik gula di Yogyakarta. Hal tersebut didukung pula dengan adanya peraturan mengenai perubahan kepemilikan tanah desa dan hak petani untuk menyewakan tanahnya kepada pihak perkebunan. Berbagai macam perkebunan ada di Yogyakarta seperti tembakau, tebu, kapuk, kopi, dan lain-lain. Perkebunan tebu membuat pemilik modal mendirikan pabrik gula di Yogyakarta. Pabrik gula yang muncul tersebut antara lain ada di Pandokan, Pundong, Pleret, Barongan, Gesikan (Bantul), Demak Ijo, Salikan, Kalasan, Tanjung Tirta, Beran, Godean, Medari, Cebongan (Sleman), Sewugalur (Kulon Progo).¹⁵

Pesatnya pembangunan pabrik gula menyebabkan banyak administrator pabrik gula yang dijabat oleh orang Belanda harus tinggal di daerah Yogyakarta. Saluran irigasi pun dibuat untuk menunjang sarana perairan di perkebunan. Irigasi yang dibangun demi perkebunan ternyata juga dimanfaatkan oleh rakyat desa untuk kepentingan ladang dan sawahnya. Akibat penggunaan irigasi membuat pertanian rakyat semakin baik, namun

¹⁴*Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1870. Tujuan dari undang-undang Agraria adalah melindungi petani-petani Indonesia agar tidak kehilangan hak milik atas tanah mereka, dan di sisi lain undang-undang tersebut memberikan peluang yang lebar bagi orang asing untuk menyewa tanah rakyat Indonesia bagi kepentingan usaha perkebunan.

¹⁵Ari Setyastuti, dkk, *Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, 2003, hlm.12.

peningkatan pertanian rakyat menjadi saingan perkebunan sehingga berbagai tindakan dilakukan untuk menghambat kemajuan rakyat. Pada akhirnya, irigasi hanya menguntungkan bagi perkebunan pengusaha Eropa, terutama perkebunan pengusaha Belanda. Pembangunan irigasi merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kepentingannya di bidang ekonomi kolonial. Rakyat pun tak berdaya menghadapi hal tersebut.

Demi kelancaran perekonomian pemerintah kolonial Belanda, selain membangun pabrik gula maka dibangun pula prasarana transportasi, perbankan, asuransi, dan perhotelan. Kantor asuransi yang didirikan pada zaman Belanda bernama *Nill Maatschappij (Nill Mij)*. Kantor asuransi ini didirikan untuk membantu berbagai masalah yang ada. Bangunan kantor ini terletak di sebelah selatan Gedung Agung dan sekarang berfungsi sebagai kantor BNI⁴⁶, ada pula Hotel Toegoe yang dibangun sekitar awal abad XX. Pada awalnya hotel ini bernama *Naamloose Vennootschap Grand Hotel de Djogdja* kemudian diubah menjadi *Naamloose Vennootschap Narba*.¹⁶

Jalur kereta api dan jaringan telepon antar kota-kota besar di Jawa sudah dibangun. Jaringan kereta api tersebut berada pula di Yogyakarta yaitu di Lempuyangan dan Tugu. Stasiun kereta api pertama di Yogyakarta dibangun oleh N.I.S. Mij S.N. di kawasan Lempuyangan pada tanggal 2 Maret 1872. Selanjutnya dibangun stasiun Tugu oleh Spoor S.S. pada tanggal 2 Mei 1887.¹⁷ Jaringan jalan kereta api diharapkan untuk memperlancar

¹⁶*Ibid.*, hlm.170-171.

¹⁷*Ibid.*, hlm.170.

pengangkutan hasil tanaman ekspor (perdagangan) dari pedalaman ke pelabuhan-pelabuhan dan bagi pemerintah terutama digunakan untuk mengendalikan pemerintahan dan menjaga keamanan.¹⁸ Jaringan lori, telepon, telegram, dan listrik dibangun untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Yogyakarta sebagai kota di daerah perkebunan menjadi pusat berkumpulnya tenaga administratif dan perkebunan sehingga memerlukan tenaga pribumi yang bisa berbicara dengan bahasa Belanda. Didirikan sekolah berorientasi ke Barat untuk mendapatkan tenaga pribumi yang sanggup mengabdikan dirinya demi kepentingan perusahaan. Pengusaha Belanda diuntungkan karena mereka dapat membayar pekerja dengan biaya yang relatif murah daripada harus mendatangkan pekerja dari negara asalnya.

Orang pribumi terpaksa menjadi buruh perkebunan kapitalis asing. Hidup para buruh bergantung dari upah yang diterimanya. Upah yang diberikan sangat sedikit dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari para pekerja. Pada umumnya yang dijadikan mandor perkebunan adalah pembesar desa. Pemerintah kolonial memperlakukangi pangreh praja¹⁹ dan bekel-bekel²⁰ untuk mendapatkan keuntungan modal bagi kaum kapitalis serta pemerintah kolonial. Orang pribumi pada umumnya patuh kepada para mandor sehingga hal itu sangat menguntungkan kaum kapitalis yang menanamkan modalnya.

¹⁸A. Daliman, *op.cit.*, hlm.73.

¹⁹Pangreh praja adalah penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda untuk menangani daerah jajahannya.

²⁰Bekel adalah pamong desa pada zaman dulu (setingkat di bawah Lurah).

C. Dari Segi Politik

Belanda bercita-cita untuk menguasai seluruh nusantara. Orang Belanda sebagai penjajah, penguasa dan pemberi pekerjaan. Belanda merealisasikan cita-citanya dengan cara menguasai berbagai daerah termasuk Yogyakarta. Kemudian orang Belanda yang bersatu dan menguasai lembaga-lembaga ekonomi dan pemerintahan utama di Hindia Belanda. Orang Belanda menguasai ekspor impor, menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan, angkatan bersenjata, pengangkutan dan komunikasi, pendidikan dan sebagainya.²¹

Belanda datang ke daerah Yogyakarta sudah sejak lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendirian benteng Vredeburg oleh VOC. Pendirian benteng ini bukanlah tanpa sebab, ada maksud tersembunyi di belakangnya. Benteng Vredeburg didirikan tepat di depan keraton Yogyakarta dengan kedok untuk melindungi keamanan keraton dan sekitarnya, namun pada alasan sesungguhnya adalah untuk mengawasi gerak-gerik kraton Yogyakarta. VOC telah mempertimbangkan masak-masak strategi untuk tetap bertahan di daerah Yogyakarta selama mungkin. Hal tersebut terbukti hingga benteng diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda.

Setelah benteng Vredeburg berpindah ke tangan pemerintah kolonial Belanda, benteng ini digunakan untuk benteng pertahanan. Beberapa fasilitas yang ada di dalam kompleks benteng tersebut berfungsi sebagai pendukung sarana pertahanan. Benteng Vredeburg juga digunakan sebagai gudang mesiu,

²¹William Joseph O'Malley, *op. cit*, hlm. 33

ruang tahanan, dan barak prajurit.²² Benteng Vredeburg memiliki bangunan pendukung lainnya seperti gedung pengapit utara dan selatan (kantor administrasi), fasilitas umum (rumah sakit), gedung *societet*, paviliun, gudang perlengkapan non militer, gedung dapur, rumah tahanan, perumahan perwira, gudang senjata, gedung istal (kandang kuda), sumur, dan anjungan.²³ Gedung Societet digunakan untuk pertemuan orang-orang Eropa, khususnya Belanda. Rumah tahanan yang ada di dalam Benteng Vredeburg khusus diperuntukkan bagi orang Eropa, sedangkan bagi masyarakat pribumi dimasukkan dalam penjara Wirogunan sekarang di jalan Taman Siswa No.6 Yogyakarta.

Benteng Vredeburg digunakan untuk mengawasi lingkungan sekitar benteng dan melihat langsung kompleks keraton Yogyakarta. Secara strategis, benteng ini bisa menjadi ancaman bagi keraton Yogyakarta karena meriam-meriam yang ditempatkan dalam benteng dan bisa diangkat ke atas dengan jangkauan tembak mencapai bagian dalam kraton.²⁴ Pihak kolonial takut kalau aktivitas di dalam keraton Yogyakarta tidak diawasi akan terjadi pemberontakan yang mengancam keberadaan pemerintah kolonial di Yogyakarta. Cara lain yang dilakukan pemerintah kolonial untuk

²²Tim penyusun, *Museum Benteng Vredeburg*, Yogyakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, 2007, hlm. 11

²³Tim penyusun, *Buku Panduan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta*, Yogyakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, 2012, hlm. 22-31

²⁴*Ibid.*, hlm.9.

mengendalikan pemerintahan Kasultanan Yogyakarta dengan memunculkan peran pepatih dalem (*rijksbestuurder*).²⁵

Setelah pemerintah kolonial Belanda sendiri yang memegang kendali, terjadi beberapa perubahan di bidang politik. Salah satu perubahan tersebut terjadi ketika kaum liberal Belanda menghendaki dihapuskannya tanam paksa. Kaum liberal mendesak pemerintah untuk mengubah sistem tanam paksa menjadi sistem liberal yang terkait dengan politik pintu terbuka sehingga kaum liberal dapat mengembangkan usahanya di tanah jajahan. Kaum liberal mendesak pemerintah untuk melaksanakan politik etis²⁶ demi memajukan masyarakat di tanah jajahan. Politik Etis ini dikemukakan oleh Van Deventer.

Hubungan antara pemerintahan kolonial dan kraton Yogyakarta perlu dijaga agar pihak kraton Yogyakarta tidak melakukan pemberontakan. Hubungan antara Gubernur Jenderal dan Kasultanan sudah diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan *politik contract*. Jangka waktu perjanjian *politik contract* ini relatif lama yaitu puluhan tahun. *Politik contract* terakhir dengan Kasultanan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dan diundangkan dalam Staatsblad 1941 No. 47. Isinya adalah untuk mengatur

²⁵Pepatih dalem bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari Kasultanan. Pepatih dalem diangkat oleh Sultan atas persetujuan Gubernur Belanda. Ia bertanggung jawab, bersumpah setia, dan mendapat gaji dari sultan dan gubernur. Dalam praktiknya, Belanda memakai Pepatih dalem untuk mengendalikan Sultan. Lihat buku karangan Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 12.

²⁶ Politik Etis disebut juga politik balas budi. Politik Etis meliputi tiga hal yaitu imigrasi, edukasi, dan irigasi.

hubungan politik diantara Daerah Swapraja²⁷ dan Gubernur Hindia Belanda.²⁸ Selanjutnya hubungan politik itu lebih jauh diatur dalam *politik contract*.

Munculnya permukiman masyarakat Eropa, khususnya bagi warga Belanda di Kotabaru tidak lepas dari adanya Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) yang menyebabkan kota-kota di Jawa mengalami perkembangan pesat. Kota-kota tersebut nantinya akan disebut dengan kota-kota kolonial karena pengaruh pemerintahan kolonial sangat terlihat. Kebijakan desentralisasi membuat setiap daerah dapat membentuk pemerintahannya sendiri beserta administrasinya. Peraturan lain yang diberlakukan yaitu politik *wijkenstelsel*²⁹. Daerah Yogyakarta memiliki peraturan yang lebih khusus berkaitan dengan pembangunan permukiman. Peraturan tersebut telah diatur dalam *Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta* No. 12 tahun 1917.³⁰

²⁷ Swapraja adalah daerah yang berpemerintahan sendiri.

²⁸ Tim Penyusun, *Kota Yogyakarta 200 Tahun: 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*. Yogyakarta, 1956, hlm.40-41.

²⁹ *Wijkenstelsel* yaitu peraturan pengelompokan tempat tinggal orang-orang Eropa yang terkonsentrasi di satu tempat.

³⁰ *Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta* No. 12 tahun 1917 terdiri dari 11 bab yang berisi tentang pemberian lahan beserta wewenangnya supaya dapat didirikan bangunan, jalan, taman beserta perawatannya dengan ketentuan yang diatur oleh pihak kasultanan. Penggunaan lahan tersebut dibebani pajak dan uang sewa supaya menguntungkan kasultanan. Penggunaan tanah ditangani oleh sebuah komisi yang diberi nama Komisi pengguna tanah yang mendapat uang muka penggunaan dari kesultanan yang bunganya 5% per tahun. Pihak kasultanan dan karesidenan yang menentukan anggota komisi ini. Sebagai pelaksana proyek pembuatan kawasan ini adalah Departemen van Sultanaat Warken dengan ketuanya yaitu Ir. L.V.R. Bijleveld.

D. Dari Segi Sosial Budaya

Penyebaran agama Kristen di daerah jajahan tidak lepas dari semangat yang sejak dulu telah diusung oleh bangsa Eropa yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Kondisi Kotabaru Yogyakarta pada saat kegiatan misi Katolik pada awal abad ke-20 masih menyerupai kampung pinggiran kota karena kompleks Kotabaru baru dalam proses pembangunan. Kompleks ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa, khususnya Belanda yang ada di Yogyakarta. Kawasan Kotabaru Yogyakarta belum ada gereja sebagai sarana untuk beribadah, sehingga menimbulkan suatu keprihatinan.

Pada tahun 1918 F. Strater. S.J. datang ke Yogyakarta. Kegiatan pewartaan iman Katolik di Kotabaru di mulai pertama kali ketika F. Strater S.J. menyewa rumah di seberang masjid Syuhada sekarang. Tempat tersebut disewa sebagai tempat ibadat, kelas agama, dan pastoran. Perhatian Strater tercurah untuk menyebarkan agama di Kotabaru dengan membentuk korps gembala dan pendirian Kolese. Beliau membeli tanah lapang dan kuburan yang nantinya akan dibangun gereja St. Antonius Kotabaru, Kolese St. Ignasius (Kolsani), Seminari Tinggi, Widyamandala.³¹

F. Strater. S.J. mendirikan Kolese Santo Ignatius pada tahun 1922.³² Peningkatan jumlah umat di Kapel Kolese yang terbuka untuk umum

³¹Panitia Peringatan 50 tahun Gereja Santo Antonius Kotabaru Yogyakarta, *Sejarah Gereja Kotabaru Santo Antonius dan Kehidupan umatnya*. Yogyakarta: Gereja Santo Antonius Kotabaru, hlm.6.

³²Tim Penyusun, *Bertumbuh untuk Berbagi: 85 Tahun Gereja Santo Antonius Kotabaru Yogyakarta*. Yogyakarta: Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta, 2011, hlm.11.

mendorong pembangunan gereja. Pada tahun 1926 didirikan Gereja Santo Antonius Kotabaru untuk memperlancar penyebaran agama Kristen Katolik di Yogyakarta. Mgr. A. Van Velsen, S.J., Uskup Jakarta yang membawahi Jawa Tengah dan Yogyakarta memberkati dan meresmikan Gereja Santo Antonius Kotabaru pada 26 September 1926.³³

Orang Belanda juga membawa pengaruh keagamaan Kristen Protestan. Hal ini dapat diketahui dari adanya Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang ada tidak jauh dari Gereja Santo Antonius Kotabaru yaitu di sebelah utaranya, tepatnya di jalan Nyoman Oka. Pada awalnya HKBP bernama Gereja Kristen *Gereformeerd* yang dikenal pula dengan Gereja *Gereformeerd Kerk*. Gereja ini diresmikan pada tahun 1923 demi kepentingan keagamaan orang Belanda yang beragama Kristen Protestan dan demi kepentingan penyebaran misi yang mereka anut.³⁴

Terkait dengan penyebaran agama Kristen khususnya di kawasan Kotabaru dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, maka didirikan sebuah Rumah Sakit Kristen. Rumah Sakit keagamaan diatur sepenuhnya oleh *zending*³⁵ dan *missi*³⁶ yang mempunyai pusat di negeri Belanda dan Jerman. Pemerintah kolonial sendiri tidak mengatur secara khusus tentang rumah

³³*Ibid.*,

³⁴Tim Penyusun, *Toponim Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2007, hlm. 128

³⁵*Zending* adalah pengkabar Injil dan usaha-usaha menyebarkan agama Kristen.

³⁶*Missi* adalah pewartaan iman sebagai orang Kristen.

sakit.³⁷ Rumah Sakit Kristen yang ada di Kotabaru adalah Rumah Sakit Petronella. Pada awalnya terbuat dari bambu dan didirikan oleh dr. Jan Gerrit Scheurer pada tahun 1897.³⁸ Dr. Jan Gerrit Scheurer ini yang menjadi pioneer atau pelopor dalam memulai pekerjaan medis dan meletakkan dasar-dasar bagi pekerjaan pelayanan kesehatan di Yogyakarta.

Rumah Sakit Petronella mendapat bantuan modal dari Ny. Petronella. Pada tahap awal perusahaan kereta api memberikan bantuan untuk pendirian rumah sakit “*Petronella*” dalam bentuk penyediaan sarana transportasi gratis untuk mengangkut bahan-bahan konstruksi. Beberapa perusahaan juga memberikan bantuan kepada aktivitas layanan kesehatan.³⁹ Perusahaan itu membutuhkan layanan kesehatan bagi para pekerja mereka dan penduduk sekitar perusahaan. Bantuan juga mengalir dari Perkumpulan di negeri Belanda. Perkumpulan itu bernama Vereeniging “Dr. Scheurer’s Hospital yang dipimpin oleh Prof. Dr. F. L. Rutgers. Berkat bantuan tersebut pembangunan “*Het Zendingsziekenhuis Petronella*” dengan kapasitas 150 tempat tidur dapat diselesaikan.⁴⁰ Tahun 1911-1917 ada beberapa rumah sakit

³⁷Guno Samekto, *Membina Rumah Sakit Bethesda yang Bertanggung Jawab: suatu ulasan pandangan pribadi*, Yogyakarta:RS. Bethesda, 1980, hlm. 3

³⁸*Ibid.*, hlm. 4

³⁹Langgeng Sulistyو Budi, Fasilitas Sosial Perkotaan Pada Awal Abad Ke-20: Rumah Sakit dan Sekolah di Yogyakarta dalam Sri Margana dan M. Nursam (Ed), *Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak, 2010, hlm.180.

⁴⁰Guno Samekto, *loc.cit.*

di kawasan Yogyakarta yang menerima subsidi pemerintah, salah satunya adalah rumah sakit “*Petronella*”.⁴¹

Kepentingan lainnya adalah mengubah cara pikir masyarakat pribumi di negeri jajahan, khususnya masyarakat pribumi di Yogyakarta untuk dapat mengikuti cara pikir orang Belanda yang liberal. Orang Belanda ingin memperlihatkan bahwa memiliki material yang banyak di dalam hidup akan mempermudah pencapaian cita-cita karena mereka berpikiran materialistik. Orang-orang Eropa juga mempunyai sifat individual yang tinggi tidak seperti orang pribumi yang terlalu solider dengan orang lain, namun tetap mengutamakan kepatuhan terhadap penguasa yaitu pemerintah kolonial Belanda.

Pemerintah Belanda sengaja membedakan status sosial antara orang Eropa dengan orang pribumi agar mereka dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat pribumi. Masyarakat Belanda dan orang Eropa pada umumnya berada pada status yang paling atas karena mereka berasal dari ras kulit putih. Diskriminasi ras sangat terlihat jelas antara ras kulit putih dengan ras kulit berwarna. Ras kulit putih sebagai minoritas, tetapi merekalah yang menjadi penguasa dan ras kulit berwarna jauh tertinggal di bawahnya. Ras kulit putih menganggap rasnya adalah ras yang unggul.

Demi menyebarkan budaya Belanda, maka pemerintah Belanda menetapkan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Hal itu dikarenakan pada pergantian abad kesembilan belas ke abad kedua

⁴¹Langgeng Sulistyono Budi, *loc.cit.*

puluh, orang yang menguasai bahasa Belanda masih relatif sedikit. Di antara orang Eropa sendiri, tidak semuanya bisa berbahasa Belanda sebab hanya 40% yang dapat berbahasa Belanda secara aktif dan 30% yang menguasai secara pasif.⁴² Belum lagi orang Timur Asing dan orang pribumi yang menguasai bahasa Belanda lebih sedikit lagi jumlahnya.

Meningkatkan pengetahuan Barat pada sekelompok kecil pribumi elite sangat membantu berfungsinya pemerintahan dan dapat menumbuhkan saling mempercayai. Penggunaan bahasa yang sama berguna untuk mengisi berbagai kegiatan pemerintahan, lingkungan usaha, dan lainnya. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah dari orang pribumi yang bisa berbahasa Belanda daripada dengan orang Eropa yang diimpor. Ketika politik pintu terbuka telah dimulai, maka kebutuhan akan tenaga kerja yang dapat berbahasa Belanda semakin meningkat, sehingga penyebarluasan bahasa Belanda di Hindia-Belanda semakin gencar dilakukan.

Bahasa Belanda merupakan bahasa bantu yang dapat membuka jalan kepada pengetahuan barat yang harus disebarluaskan. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Bahasa Belanda diharapkan mampu mendekatkan kebudayaan Belanda kepada tanah jajahannya di Hindia-Belanda. Hal itu dikarenakan selama ini bahasa Melayu lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁴³ Bahasa Belanda perlu ditingkatkan sebagai

⁴²Kees Groeneboer, *Jalan Ke Barat Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950: Sejarah Politik Bahasa (terjemahan)*, Jakarta: Eramus Taalcentrum, 1995, hlm. 231.

⁴³*Ibid.*, hlm. 254

perhubungan antaranggota masyarakat lapisan atas. Faktor yang mempercepat pembelandaan adalah posisi persaingan antara Indo-Eropa terhadap kelompok pribumi dan Cina. Kekhawatiran akan tertinggal oleh kelompok pribumi maupun etnis Cina merupakan rangsangan bagi orang Indo-Eropa untuk berusaha belajar bahasa Belanda.⁴⁴

Pemakaian bahasa Belanda yang mulai diterapkan diharapkan bisa menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan bangsa Belanda di tanah jajahan Hindia-Belanda. Pemakaian bahasa Belanda akan mempengaruhi pemikiran masyarakat pribumi di tanah jajahan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan rohani dan diharapkan dapat memperkokoh hubungan yang dijalin antara negara penguasa dan daerah jajahan. Bahasa Belanda juga digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai alat politik untuk mempertinggi derajat dan kekuatan bangsa Belanda.⁴⁵ Penyebaran bahasa Belanda di tanah jajahan yaitu Indonesia akan mengangkat derajat negara Belanda di mata negeri-negeri asing.

Pemerintah Belanda ingin membuat pengetahuan bahasa Belanda dapat diagung-agungkan oleh orang pribumi. Pemerintah kolonial Belanda menanamkan pemikiran kepada masyarakat pribumi bahwa bahasa Belanda adalah modal utama untuk maju.⁴⁶ Bahasa Belanda menjadi ukuran intelektualitas dan mempunyai nilai yang tinggi di mata rakyat yang terjajah.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 294.

⁴⁵*Ibid.*, hlm.237.

⁴⁶Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid I*. Yogyakarta: LKiS, 2008, hlm.316.

Tujuan lainnya adalah untuk menyadarkan orang Belanda yang tinggal di Hindia-Belanda agar tetap menyadari pentingnya kesatuan bangsa dan menanamkan solidaritas di antara kaumnya.

Budaya Belanda yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari seperti cara berpakaian, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Cara berpakaian orang Belanda yang memakai kemeja dan rok juga sangat berpengaruh pada masyarakat pribumi. Mula-mula cara berpakaian tersebut wajib digunakan bagi murid-murid yang bersekolah. Lalu diterapkan pula pada perawat rumah sakit, dan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah orang-orang Belanda.

Orang Belanda sangat memperhatikan kebersihan makanan yang mereka makan. Orang Belanda mengajarkan kepada para pembantu dan orang-orang yang sering berinteraksi dengan mereka agar selalu menjaga kebersihan. Kebersihan berkaitan erat dengan kesehatan sehingga orang Belanda membawa budaya untuk percaya kepada obat-obatan modern dan pengetahuan Barat yang modern. Hal-hal tersebut lambat laun mempengaruhi masyarakat pribumi untuk belajar menjaga kebersihan dan kesehatan.